BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pertumbuhan suatu daerah erat kaitannya dengan baiknya pengelolaan perekonomian pada daerah tersebut. Sehingga pada reformasi sektor public yang disertai adanya tuntutan demokratisasi menyebabkan aspek transparansi dan akuntabilitas, sehingga membuat kedua aspek tersebut menjadi hal penting dalam pengelolaan pemerintah termasuk pada bidang pengelolaan keuangan negara maupun daerah.

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU. No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah) tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah adalah sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan (UU. No 32 Tahun 2004).

Otonomi daerah adalah upaya untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri

sesuai dengan perundang-undangan. Tujuan pemberian otonomi daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan bagi pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan (UU.No 33 Tahun 2004)

Pengertian pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Nurcholis (2007:182), pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain lain yang sah.

Dari beberapa pendapat diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan keuangan suatu daerah, dimana penerimaan keuangan itu bersumber dari potensi potensi yang ada didaerah tersebut misalnya pajak daerah, retribusi daerah dan lain lain, serta penerimaan keuangan tersebut diatur oleh peraturan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap daerah berbeda beda. Daerah yang memiliki kemajuan padabidang industri dan memiliki kekayaan yang melimpah cenderung memiliki PAD jauh lebih besar dibanding daerah lainnya, begitu juga sebaliknya. Karena itu terjadi ketimpangan Pendapatan Asli Daerah. Pada satu sisi ada daerah yang sangat kaya karena memiliki PAD yang tinggi dan disisi lain ada daerah

yang tertinggal karena memiliki PAD yang rendah, permasalahan yang dihadapi daerah pada umumnya berkaitan dengan penggalan sumber sumber pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen dari PAD dan masih belum memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Kemampuan perencanaan dan penguasaan keuangan yang lemah. Hal tersebut dapat mengakibatkan kebocoran-kebocoran yang sangat berarti bagi daerah. Peranan Pendapatan Asli Daerah dalam membiayai kebutuhan pengeluaran daerah sangat kecil dan bervariasi antar daerah,. Distribusi pajak antar daerah sangat timpang karena basis pajak antar daerah sangat bervariasi. Peranan pajak dan retribusi daerah dalam pembiayaan yang sangat rendah dan bervariasi hal ini terjadi karena adanya perbedaan yang sangat besar dalam jumlah penduduk, keadaan geografis (berdampak pada biaya relative mahal) dan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mengakibatkan biaya penyediaan pelayanan kepada masyarakat sangat bervariasi.

Dana Alokasi Umum merupakan dana bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah. Daerah yang mempunyai potensi pajak dan Sumber Daya Alam (SDA) yang besar hanya terbatas pada sejumlah daerah tertentu saja. Peranan Dana Alokasi Umum terletak pada perbedaan cara pandang antara pusat dan daerah tentang Dana Alokasi Umum terletak pada kemampuannya untuk menciptakan

pemerataan berdasarkan pertimbangan atas potensi fiskal dan kebutuhan nyata dari masing masing daerah.

Sumber-sumber Pendapatan Daerah yang diperoleh dan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.mengatakan bahwa belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintah Daerah, organisas, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek , dan rincian obyek belanja. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib , urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial . Dalam rangka memudahkan penilaian kewajaran biaya suatu program atau kegiatan, belanja menurut kelompok belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah,bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan , dan belanja tidak terduga.

Belanja daerah menurut IASC Framework (Halim,2002 : 73) biaya atau belanja daerah merupakan penurunan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar, atau deplasi aset, atau terjadinya hutang yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada para peserta ekuitas dana.

Sedangkan menurut Undang-Undang No.58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah “Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih “.

Sumber-sumber Pendapatan Daerah yang diperoleh dan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah. Belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintah menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian objek belanja. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Urusan wajib sendiri urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah, sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, keikhlasan, dan potensi keunggulan daerah.

Pemerintah Daerah perlu menyusun APBD untuk menjamin kecukupan dana dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya. Karena itu perlu diperhatikan kesesuaian antara kewenangan pemerintahan dan sumber pendanaannya. Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah baik dalam bentuk uang, barang, dan atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD. Penganggaran penerimaan dan Pengeluaran APBD harus memiliki dasar hukum

penganggaran. Anggaran belanja daerah diprioritaskan untuk melaksanakan kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Tabel 1.1. Anggaran PAD, DAU, dan Belanja Daerah Kota Batam

TAHUN	PAD	(%)	DAU	(%)	BELANJA DAERAH	(%)
2010	175.044.493.202,-	90,84	230.164.681.000,-	100	1.284.136.946.162,-	90,11
2011	276.757.849.579,-	117,27	316.627.023.000,-	100	1.290.046.449.434,-	92,27
2012	371.655.668.413,-	111,17	429.672.271.000,-	100	1.480.722.555.165,-	88,28
2013	515.456.622.984,-	117,63	528.839.827.000,-	100	1.808.648.575.640,-	92,62
2014	643.356.518.018,-	121,23	559.103.958.000,-	100	2.168.207.401.217,-	99,75
2015	812.739.614.160,-	102,95	529.988.410.000,-	100	2.375.904.769.162,-	90,60

Tabel 1.1 diatas adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja untuk Tahun 2010-2015 yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah dan bagian Sekretariat Pemerintah Kota Batam.

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP PENYUSUNAN ANGGARAN BELANJA DAERAH DI KOTA BATAM”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, ,maka diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah mempunyai persentase yang tidak stabil, di beberapa tahun terjadi kenaikan pendapatan tetapi di beberapa tahun juga mengalami penurunan persentase atas pendapatan.
2. Dana Alokasi Umum berada di persentase yang stabil, tetapi masih jauh dari yang diharapkan.
3. Dari Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) diatas, maka jelas berpengaruh terhadap penyusunan anggaran belanja daerah. Dari pendapatan daerah tersebut, belanja daerah pada 2011 mengalami kenaikan 2,16% dari Tahun 2010, tetapi pada Tahun 2012 anggaran belanja turun 3,99% dari 92,27% menjadi 88,28%. Tahun 2013 kembali mengalami kenaikan anggaran sebesar 4,34% hingga puncaknya pada Tahun 2014 anggaran belanja daerah naik cukup signifikan sebesar 7,13% sehingga belanja daerah hampir mencapai 100% yaitu 99,75%, namun anggaran belanja daerah pada tahun 2015 kembali mengalami penurunan sebesar 9,15%

Dari data diatas, peneliti menyimpulkan adanya ketidak maksimalan daerah dalam memaksimalkan potensi daerah sehingga menyebabkan PAD dan DAU di beberapa tahun berjalan yang timpang dibanding dengan belanja daerah Kota Batam.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam penerapan penelitian ada beberapa batasan yang dibuat yaitu ?

1. Penelitian yang dilakukan menurut data Tahun 2010-2015.
2. Penelitian pada PAD, DAU dan Belanja daerah dibatasi pada data yang diterima dari Pemko Batam.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dapat ditarik permasalahan yang akan difokuskan pada penelitian antara lain :

1. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Penyusunan Anggaran Belanja Daerah di Kota Batam periode 2010-2015
2. Bagaimana Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Penyusunan Anggaran Belanja Daerah di Kota Batam periode 2010-2015
3. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Penyusunan Anggaran Belanja Daerah di Kota Batam Periode 2010-2015

1.5 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang diidentifikasi, maka penelitian bertujuan untuk membuktikan bahwa secara empiris berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah pada Pemerintahan di Kota Batam.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang penggunaan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah di Pemerintahan Kota Batam.
2. Bagi Praktisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi Pemerintahan Kota Batam.
3. Bagi Akademisi hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi akademisi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi pemerintahan khususnya mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Penyusunan Anggaran Belanja Daerah.